


Bupati Maluku Tenggara Berkomitmen Mencegah PUNGGLI.

Written by zt

Thursday, 24 November 2016 13:51 - Last Updated Thursday, 24 November 2016 13:56

Langgur,-- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 yang dilakukan INSPEKTORAT Kabupaten Maluku Tenggara yang dibuka secara resmi oleh Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun di Grand Villia Hotel, Rabu (23/11).

Adapun pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah dan Rapat Pemutakhiran Data ini merupakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Semester II. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja Daerah dengan penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) terbaik oleh Bupati Maluku Tenggara kepada masing-masing pimpinan SKPD yang memperoleh Penghargaan tersebut diantaranya : Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya dilakukan pula penandatanganan komitmen pencegahan dan Pemberantasan . Lebih lanjut Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun, mengatakan bahwa sehubungan dengan penegakan pelayanan publik untuk penertiban administrasi dan keuangan, maka Pemerintah Daerah Maluku Tenggara perlu memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab tanpa harus ada Pungutan Liar (PUNGGLI) dilingkup SKPD Kabupaten Maluku Tenggara. Olehnya Bupati Maluku Tenggara bersama melakukan penandatangan Kerjasama dengan Pimpinan SKPD terkait antara lain ; Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara yang terkait langsung dengan hal-hal pungutan. Bupati A. Rentanubun menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum Pegawai yang melakukan pungutan terhadap masyarakat diluar ketentuan yang berlaku, sehingga adanya kepercayaan publik terhadap penyelenggara Birokrasi di Maluku Tenggara lebh baik.